

BAB III

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hasil pembahasan tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

Implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kepolisian serta Peraturan Kepala Kepolisian tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun jika melihat dari kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan belum diatur secara jelas mengenai pembagian kewenangan antara kedua instansi tersebut dan pada saat ini dalam pelaksanaan penyidikan terdapat pembagian kewenangan antara penyidik kepolisian dengan penyidik BNN yang didasarkan hanya pada kebiasaan. Kebiasaan yang ada yaitu Penyidik Kepolisian menangani tindak pidana Narkotika yang kecil-kecil sedangkan Penyidik BNN menangani tindak pidana narkotika yang besar-besar.

E. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas kualifikasi-kualifikasi pembagian kewenangan antara Penyidik Kepolisian dengan Penyidik BNN demi terciptanya kepastian hukum dan agar tidak mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani tindak pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AR Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Iskan, 2017, *Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Penerbit Erlangga Mahameru, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublis (Grup Penerbitan CV Budi Utama) Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, cetakan pertama, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Lysa Angrayni dan Yustiati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Ridwan H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sundari dan Endang Sumiarni, 2015, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tolib Efendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang.

Wirdjono Projodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Jurnal:

M. Sahid, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dengan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia*, Bangkalan, STKIP PGRI Bangkalan.

Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III Desember 2010: 246-259.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi> pada tanggal 1 Januari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> pada tanggal 29 Januari 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 30 Januari 2019.

Data Statistik BNN <https://bnn.go.id/>, diakses 24 Januari 2019 Pukul 18:00 WIB

Data Statistik BNN, beranda, <https://bnn.go.id/>, diakses 17 Februari 2019.

Data Statistik BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beranda, <https://yogyakarta.bnn.go.id/> diakses 17 Februari 2019